

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA****UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **I GUSTI AYUADITI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **1000638**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.850.000.000**

1. Tanah Seluas 257 m2 di KAB / KOTA LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 5.509 m2 di KAB / KOTA LOMBOK UTARA, Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/197 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 170.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 ECVT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, VESPA SPRINTIGET 150 ABS A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 1.930.566.749****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 4.950.566.749****III. HUTANG** **Rp. ----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

4.950.566.749

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.